

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari)

Sri Wahyunifa, Syaifudin, S. Kasim, Bakri Yusuf
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Halu Oleo, Kendari
Jl. H. E. A. Mokodopit, Kendari 93232
e-mail: Salvhvuufashion22@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung wawancara dengan narasumber berupa tanggapan atau pendapat responden mengenai suatu permasalahan yang diajukan dalam penelitian, Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain arsip/laporan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan fokus penelitian mengenai pengukuran efektivitas program KOTAKU didapat bahwa tingkat efektifitas dalam pelaksanaan program KOTAKU belum efektif, karena belum memenuhi 8 kriteria kota bebas dari kategori kumuh.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pelaksanaan program, KOTAKU*

PENDAHULUAN

Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan

pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah telah mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke empat Undang - Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selama ini, senantiasa diarahkan dan ditujukan untuk memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi perhatian pemerintah, terutama penanggulangan kemiskinan masyarakat yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Walaupun demikian, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan hingga saat ini. Berbagai kebijakan pemerintah telah diimplementasikan, namun hanya terkesan trial and error.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 110/KPTS/DC/2016 Tentang Penetapan Lokasi Program KOTAKU bahwa masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare.

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kota Tanpa kumuh (KOTAKU) akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Tahapan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah pendataan. Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal

(baseline) 7 Indikator Kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

BKKM Sanua adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga Kelurahan Sanua dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sanua yang dibentuk secara partisipatif. BKM Sanua salah satu pelaksana dilapangan yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan karena sudah berpengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. BKM ini “direvitalisasi” dari sebelumnya yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke penanganan kumuh.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan (Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat). Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah (<http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>, diakses tahun 2019).

Dalam mencapai tujuan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), maka Kementerian Pekerjaan umum untuk mengukur indikator kumuh yaitu 7 + 1 indikator kumuh yaitu bangunan gedung, jalanan lingkungan, penyediaan air bersih, drainase lingkungan, pengelolaan air bersih, pengelolaan persampahan, ruang terbuka publik, pengamanan kebakaran. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif dapat mencapai hasil (outcome) yang diharapkan, atau mencapai target/tujuan berkaitan dengan upaya pengukuran ataupun penilaian terhadap sejauh mana tercapainya suatu tujuan (Dunn, 2013).

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi yang terkait, mulai dari ditingkat Pusat sampai ketinggian Daerah (provinsi, kabupaten dan kota), tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; mulai dari perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait. Oleh sebab itu di perlukam pelaksanaan program yang baik agar mencapai tujuan dari program KOTAKU.

Berdasarkan SK Wali Kota Kendari N0 389 tahun 2016 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh di kota Kendari, berdasarkan SK Walikota Kendari luas kawasan kelurahan Sanua untuk dijadikan kawasan Kota Tanpa Kumuh seluas 14,30 hektar dengan kategori kumuh berat. Adanya program ini kota Kendari khususnya kelurahan Sanua juga menjadi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sehingga program yang di jalankan pemerintah daerah kota Kendari terssebut berjalan sampai sekarang, akan tetapi Pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Sanua masih terdapat banyak kendala yang dihadapi. Masalah yang paling mendasar di kelurahan Sanua adalah rumah warga rawan banjir, rawan longsor serta kurangnya infrastruktur yang dibangun di lokasi tersebut. Padahal salah satu kriteria dari Program KOTAKU adalah penyediaan infrastruktur yang memadai.

Sejak tahun 2015 Kelurahan Sanua mendapatkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sampai tahun 2016. Pada tahun 2014 kelurahan Sanua merupakan kelurahan yang kumuh, sebab keluruhan Sanua berada di kota, oleh sebab itu pemerinah kota Kendari mencanangkan program KOTAKU, sehingga

dengan program ini kelurahan Sanua menjadi kampung kreatif dan inovatif sehingga kelurahan ini tidak kumuh lagi.

Kelurahan Sanua mendapatkan anggaran awal untuk program KOTAKU di tahun 2015 sebesar 1 milyar dan tahun 2016 1 milyar. Kelurahan Sanua telah digunakan untuk membangun air bersih, jalanan, pengolahan sampah, dan drainase. Anggaran yang di berikan pemerintah daerah sebesar 1 milyar tersebut sudah berhasil membangun sistem drainase, air bersih, tempat sampah, dan jalanan. Namun, pembangunan ketiga saluran drainase tersebut yang ditanam antara ruas jalan satu dengan ruas jalan lainnya belum tersambung secara maksimal. Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Efektifitas Pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilakukan di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif dan kuantitatif, data primer yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan BKM Sanua, kepala Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Sanua sedangkan data Sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain arsip/laporan. Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat

Di tahun 2016 program KOTAKU hadir sebagai program untuk menanggulangi masalah kumuh di perkotaan.. Program KOTAKU merupakan program kelanjutan dari program PLPBK. Penelitian ini mengacu pada teori Nugroho (2003) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan:

1. Tepat Kebijakan

Kebijakan pemerintah terkait dengan KOTAKU berawal dari dukungan akan kebijakan pemerintah dalam pengentasan Kota kumuh khususnya di wilayah perdesaan. Program pemerintah dalam mengatasi kota kumuh atau yang lebih dikenal dengan KOTAKU berupaya untuk meningkatkan kualitas, pengelolaan

serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Program pemerintah untuk mengatasi daerah kumuh perlu adanya kebijakan-Kebijakan yang tepat sasaran agar berbagai persoalan pemerintah kota mengenai panataan perkotaan dapat teratasi dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa program KOTAKU di kecamatan Sanua lebih terfokus pada pembangunan fisik. Pembuatan drainase dan air bersih di kecamatan Sanua tidak lepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi program tersebut baru dapat dinikmati oleh sebagian RT saja karena masih terkendala oleh dana. Awal mula Program KOTAKU berjalan di Kecamatan Sanua, pemerintah memberikan dana sebesar 1 milyar. Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan dan pembuatan sistem drainase dan air bersih di setiap RT di Kelurahan Sanua. Padahal rencananya dana tersebut digunakan untuk membangun pembuangan air limbah dan pengadaan pengamanan kebakaran.

Dalam program KOTAKU terdapat 8 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu Kelurahan dapat dikatakan bebas dari kumuh diantaranya adalah keteraturan bangunan, jalan lingkungan yang memadai, drainase lingkungan, penediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik. Namun, ada salah dua dari 8 kriteria program KOTAKU belum bias direalisasikan, yaitu penyediaan pengamanan kebakaran pengelolaan air limbah. Pengamanan kebakaran belum menjadi prioritas dari program KOTAKU terutama di Kelurahan Karangwaru. hal ini menyebabkan program KOTAKU belum dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari indikator tepat kebijakan.

2. Tepat Pelaksanaan

Pelaksanaan rogram KOTAKU melibatkan berbagai unsur dan instansi terkait yang berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai

tingkat pusat. Namun diharapkan peran pemerintah daerah selaku pembina pembangunan di wilayahnya dapat mendukung secara optimal penyelenggaraan KOTAKU ini dengan memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan program dan mewujudkan harmonisasi program dan koordinasi antar tingkat atau jenjang pemerintah yang lebih optimal. Sehingga perlu untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam implementasi KOTAKU.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat seperti yang dijelaskan oleh narasumber di atas, memang sebenarnya penataan kota tanpa kumuh atau lebih dikenal dengan sebutan KOTAKU bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan lembaga pemerintah yang terkait juga dinilai perlu berperan aktif dalam upaya pengentasan perkumuhan Kota.

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas menunjukkan bahwa Kerjasama yang terjadi dalam implementasi program KOTAKU terkait dengan tiga hal, yaitu kerjasama antara Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Kendari dengan BKM Sanua, kerjasama antara BKM Sanua dengan masyarakat Kelurahan Sanua, kerjasama antara Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Kendari dengan masyarakat Kelurahan Sanua. Selain itu terdapat kerjasama antara BKM Sanua dan Lurah.

3. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran ini sangat penting untuk dilihat, karena apabila sasaran tidak tercapai maka nantinya dapat dikatakan suatu program tersebut kurang berhasil dilaksanakan di suatu desa/kelurahan. Tujuan KOTAKU itu sendiri adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

Wawancara yang dilakukan peneliti mengenai pembangunan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah melalui program KOTAKU ini, wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala Lurah Sanua, sebagai berikut:

Dalam Program KOTAKU masyarakat Kelurahan merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan. Oleh karena itu perlu dilakukan persiapan yang matang bagi keterlibatan masyarakat dan dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat bukan berarti kinerja program buruk. Bisa juga berarti bahwa masyarakat menjadi terberdaya dan lebih sadar, peduli dan secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

Program ini akan mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat, mememberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merancang, melaksanakan, mengelola dan memantau program-program berbasis komunitas. Selain itu juga untuk penguatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat, peningkatan layanan dan infrastruktur desa melalui program KOTAKU.

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas dengan indikator tepat sasaran menunjukkan bahwa program KOTAKU yang dilaksanakan di Kelurahan Sanua Sudah tepat Sasaran, sebab yang menjadi sasaran program KOTAKU adalah daerah yang dikategorikan kumuh dan berada di sekitar sungai. Oleh sebab itu pemerintah kota memberikan program di kelurahan tersebut.

4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

1) Lingkungan internal

Pada lingkungan internal yaitu apabila terjadi koordinasi yang baik antara lembaga terkait satu sama lainnya akan menunjang keefektifan pelaksanaan program KOTAKU, begitu pula dengan lingkungan eksternal yang dalam konteks ini ialah masyarakat. Masyarakat yang menerima program KOTAKU dan melaksanakan ataupun memiliki tanggapan positif terhadap program tersebut maka akan mempengaruhi dalam proses pelaksanaan program KOTAKU di suatu

Kelurahan. Apabila tanggapan publik terhadap program KOTAKU tidak baik, maka dalam pelaksanaannya menjadi kurang baik pula.

Ketepatan lingkungan akan mempengaruhi keefektifan pelaksanaan KOTAKU di Kelurahan Sanua, sehingga dibawah ini akan di bahas dari mulai lingkungan internal terlebih dahulu yang melibatkan lembaga-lembaga yang terkait dalam program KOTAKU. Sedangkan pihak eksternal akan dilihat dari tanggapan publik atau masyarakat mengenai KOTAKU.

Interaksi antar lembaga terkait disini juga dalam hal pengawasan, pada masing-masing tingkatan pemerintah sampai pada tingkatan terendah yaitu Kelurahan memiliki pengawas yang bertugas melaporkan perkembangan yang terjadi di Kelurahan yang nantinya juga akan sampai laporannya sampai ke tingkat pusat.

Interaksi dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait akan meminimalisir hal-hal menyimpang atau yang tidak sesuai dengan pedoman Program KOTAKU. Maka itu perlunya semua tingkatan pemerintah dalam pelaksanaan PPIP melakukan koordinasi dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling membantu dalam pelaksanaan Program KOTAKUP khususnya di tingkat perdesaan.

2) Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal yang akan dibahas yaitu tertuju pada masyarakat, karena Program KOTAKU adalah program pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat disini akan menjadi aktor yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program KOTAKU, masyarakat yang memiliki tanggapan baik terhadap program ini maka akan mengerjakan dan menjalankannya dengan baik dan tanggung jawab karena masyarakat itu mengerti akan tujuan dari program KOTAKU, sedangkan masyarakat yang memiliki tanggapan negatif terhadap program KOTAKU akan cenderung lebih kurang peduli terhadap pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan. Sehingga masyarakat yang disini termasuk dalam lingkungan eksternal kebijakan juga ikut mempengaruhi terhadap keefektifan program KOTAKU yang berlangsung. Tanggapan publik terhadap program KOTAKU disini awalnya akan dibahas melalui pernyataan yang di lontarkan dari

pihak pembuat kebijakan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pihak pusat mengetahui,

Berdasarkan penjelasan di atas dengan Indikator tepat lingkungan. Lingkungan internal dari Program KOTAKU yaitu instansi yang berperan. Lingkungan internal dapat mendukung proses perancangan suatu program. Dalam program KOTAKU, terdapat keterbukaan informasi antara Dinas pemukiman dan prasarana wilayah Kota Kendari dan masyarakat. Sedangkan lingkungan eksternalnya mencakup persepsi masyarakat terhadap program. Masyarakat Kelurahan Sanua memberikan respon positif.

4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program KOTAKU

Efektivitas organisasi dalam pelaksanaan program pembangunan ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor pendukung ini terdiri dari (i) peranan pendamping (ii) partisipasi masyarakat (iii) kemampuan kelompok sasaran (Kunarjo, 2002):

1. Peranan Pendamping

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penampingan setiap program yang dilakukan selalu didampingi oleh fasilitator kelurahan yaitu BKM Sanua itu sendiri. Untuk mencapai tujuan program maka pihak BKM Sanua selalu memberikan masukan dan arahan mengenai program yang dilaksanakan.

2. Partisipasi Masyarakat

Setelah pelaksanaan Program KOTAKU selesai, partisipasi masyarakat dalam menilai atau evaluasi pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Kemampuan Kelompok Sasaran

Dalam pembahasan penulis dapat menjelaskan beberapa hal dari hasil analisis yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas Program KOTAKU yaitu, (1) Peranan Pendamping sudah baik sehingga tidak terjadi stagnan dalam pelaksanaan Program sehingga tidak terjadi ketidak sinkronan antara harapan dan kenyataan, ada beberapa pendamping yang ditugaskan untuk menjadi

fasilitator program Kelurahan yaitu BKM Sanua (2) Partisipasi masyarakat yang menjadi harapan keberlangsungan Program KOTAKU masih membutuhkan perhatian karena ketidak fahaman masyarakat akan tetapi sebagian sudah lebih faham terhadap kebijakan program KOTAKU menyebabkan masyarakat sebagai tujuan utama program masih kurang kompak sehingga membutuhkan banyak perhatian dan pemahaman, Keterbatasan Sumber dan (3) Keterbatasan sumber daya seperti Sumber Daya Manusia yang masi tergolong minim menjadi bumerang untuk keberlangsungan program KOTAKU.

PENUTUP

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan penulis di Kelurahan Sanua, Kecamatan Lendari Barat, Kota Kendari. maka dapat disimpulkan sesuai dengan focus penelitian mengenai pengukuran efektivitas program KOTAKU didapat bahwa tingkat efektifitas dalam pelaksanaan program KOTAKU belum efektif, karena belum memenuhi 8 kriteria kota bebas dari kategori kumuh.

Tetapi jika dilihat dari ketepatan kebijakan pemerintah yang dinilai dirumuskan sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga dapat memecahkan permasalahan dan lembaga pembuat kebijakan. Masyarakat Kelurahan Sanua sangat meraskan manfaat atas hadirnya program KOTAKU di Kelurahanya, dan perubahan-perubahan yang terjadi di Kelurahan Sanua setelah adanya program Kotaku juga dapat dilihat dari teratasinya permasalahan kesulitan air bersih di Kelurahan Sanua, dan kesiapan sumber daya manusia yang sudah siap menerima dan melaksanakan program KOTAKU dengan membuktikan masyarakat Kelurahan Sanua dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada proses pembangunan. Selanjutnya, lingkungan internal (lembaga terkait) dan lingkungan eksternal (masyarakat) memiliki tanggapan yang baik mengenai program KOTAKU sehingga dalam pelaksanaannya di Kelurahan Sanua dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan program KOTAKU.

DAFTAR PUSTAKA

- A Friedlander, Walter, 1961. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Agung, Kurniawan, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta
- Biro Pusat Statistik Indonesia, 2000. *tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah*
- Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, Onong Uchjana, 2008. *Dinamika Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Eka, Yuli, 2017. <http://kotaku.pu.go.id/view/5595/sanua-kampoeng-kreatif-punya-cerita>
- Hidayat, 2006, *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Nasikun, 1993, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru.
- Prawirosentono, Suryadi, 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta:BPFE.
- Sedarmayanti, 2006, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang., P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*, Jakarta: Binapura Aksara.
- Soewarno Handyaningrat, 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung
- Suyanto, Bagong, 2005. *Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media
- Undang-undang No 11 Tahun 2009. *tentang Kesejahteraan Sosial*
- Widodo, Sri wasono. 2007. *Studi Sosial, Konsep dan Model Pembelajaran*. Bandung : Busana Nusantara.
- <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>
- <https://korkotlangsa.wordpress.com/2016/06/16/program-kotaku/>